

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anggara, Sahya. 2016. *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum* - terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Perss.
- Bohari, H. 2002. *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Burton, Richard., Wirawan B. Ilyas. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brotodihardjo, Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Petodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. Cet ke-6.
- Junaidi, Muhammad. 2016. *Ilmu Negara, Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kunto, Suharsimi Ari. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara*

- Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Narbuko, Cholid. 1998. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Bumi Aksara.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, Theadora., Umi Supraptiningsih. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rasjidi, Lili., I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2013. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Salim, Agus., Haeruddin. 2019. *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Palu: LPP-Mitra Edukasi.
- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Sibuea, Hotma P. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Sibuea, Hotma P., Dwi Seno Wijanarko. 2020. *Dinamika Negara Hukum*. Depok, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Soiso-Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Soemitro, Rochmat. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung: Eresco, Cet ke-9.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet ke-11.

- Suparno. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Pustaka Magister.
- Surya, Achmad., dkk. 2020. *Teori Hukum “Sejarah, Hakikat, Makna, dan Hubungannya Dengan Moral”*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Suryawati, Nani. 2020. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Badan Kebijakan Fiskal (BKF). 2023. *Perjalanan Transformasi Kebijakan Fiskal, Cipta, Cita, dan Asa*, Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtar.
- Wirawan, B. Ilyas., Suhartono Rudy. 2007. *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

B. Jurnal, Skripsi, Thesis.

- Abbas, Akbar Rakhmat Irhamullah., Nugroho, Arianto. (2018). *Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Jurnal Unesa. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Advianto, L.Y. Hari Sih. (2018). *SNKN 2018: Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Pengadilan Pajak.
- Harjono, Dhaniswara K. (2022). *Akibat Hukum Dan Kekaburan Norma Dalam Pengaturan Undang-Undang Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Jurnal VeJ. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia. Vol. 8 No. 2, 443-459.
- Bentley, Duncan. (2015). *Revisiting Rights Theory and Principles to Prepare for Growing Globalisation and uncertainty, International Conference on Tax Payer Rights*, November 18-19, Washington DC.
- Rijn, A.van. (1998). *A Comparative Study of Taxpayer Protection in Five Member Countries of the European Union*. In D. A. Albregtse, & H. P.

- A. M. Arendonk (Eds.), *Taxpayer protection in the European Union* (pp. 43-53). Kluwer Law International.
- Mitendra, Hario Mahar. (2018). *Fenomena Dalam Kekosongan Hukum*. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf, Jurnal RechtsVinding Online.
- Salsabila, K., & Najicha, F. U. (2021). *Penerapan Asas Yuridis Dan Asas Ekonomis Perpajakan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Positum, 6(2), 151-167
- Ferry Jordan Sembiring, Thesis (2021): “*Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Pengolahan Kelapa Sawit Dalam Pemeriksaan Pajak Atas Pengenaan Pajak Secara Renteng Dalam Penyerahan Tandan Buah Segar di KPP Madya Pekanbaru*”. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Sinaga, Niru Anata. 2016. *Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. (7) No. 1.
- Sommerfield, Ray M., Hershel M. Anderson and Horrace R. Brock. 1983. *An Introduction To Taxation*, New York: Harcourt Brace Jovanovic, Inc.
- Sormin, Karneji Sumarlin Bucika. (2016). *Kajian Teoritis Terhadap Ketentuan Tanggung Jawab Secara Renteng Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*. Skripsi Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas Padang.
- Tan, David. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. (2021). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.8: 2463-2478.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847)
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740)
- Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133)
- Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069)
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 217).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740).

D. Sumber Lainnya

_____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ/2018.

<https://konsultanpajakrahayu.com/blog/detail/1112/mengenal-istilah-tatbestand-dalam>

<https://news.ddtc.co.id/perlindungan-bagi-pembeli-dalam-sistem-pemungutan-ppn-12548>

<https://news.ddtc.co.id/tinta-emas-reformasi-pajak-1984-1997-23268>

<https://www.oecd.org/tax/administration/46274793.pdf>

<https://www.oecd.org/tax/administration/1907918.pdf>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/mengenal-tax-evasion-contohnya-hingga-sanksinya>

<https://www.online-pajak.com/seputar-pajak/spt-adalah>

<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/bagaimana-menerapkan-ppn-tanggung-renteng>

<https://www.pajak.com/pajak/aturan-baru-tanggung-renteng-ppn-dan-ppnbnm/>

<https://www.pajak.go.id/>

<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

<https://taxpayerightsconference.com>